L K J I P
TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

S KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

EmaiL : diskopukm@mail.kukarkab.go.id
WebsitE : https://diskopukm.kukarkab.go.id
Kode Pos : 75512

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggung jawaban kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH,

Drs. Tajuddin

Pembina Utama Muda

Nip. 19640405 198603 1 036

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 11

A. Capaian Kinerja Organisasi 11

B. Realisasi Anggaran 33

BAB IV PENUTUP 35

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu disusun strategi yang tepat dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada. Dengan demikian maka seluruh faktor akan ditempatkan dalam suatu kerangka yang saling terkait satu sama lain.

Permasalahan yang dihadapi kedepan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain :

1. Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Masih belum memadai dalam mengelola Koperasi;
2. Usaha yang dikelola Koperasi dan belum sesuai dengan Kebutuahan anggota dan Masyarakat dan Pengelola Koperasi belum mampu menangkap Peluang Usaha sesuai dengan Potensi;
3. Rendahnya Tingkat ketaatan Koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), kepatuhan dan akuntabilitas pengelolaan koperasi;
4. Belum maksimalnya Pertumbuhan Izin Simpan Pinjam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Masih Rendahnya Kualitas SDM Pelaku Usaha Mikro;
6. Masih rendahnya Pelaku Usaha dalam Akses Pembiayaan Legal;
7. Kualitas Produk UMKM belum sesuai standar (Produk dan Kemasan);
8. Masih rendahnya jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki Perizinan dan sertifikasi;
9. Masih rendahnya kemampuan Pelaku Usaha Mikro dalam mengakses Pemasaran;
10. Kurangnnya dukungan dari para pihak terhadap pengembangan UMKM.

11. Uraian Singkat Organisasi

Susunan Organisasi Tipe B Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan:
   a. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan dan Aset.
3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
7. UPTD.

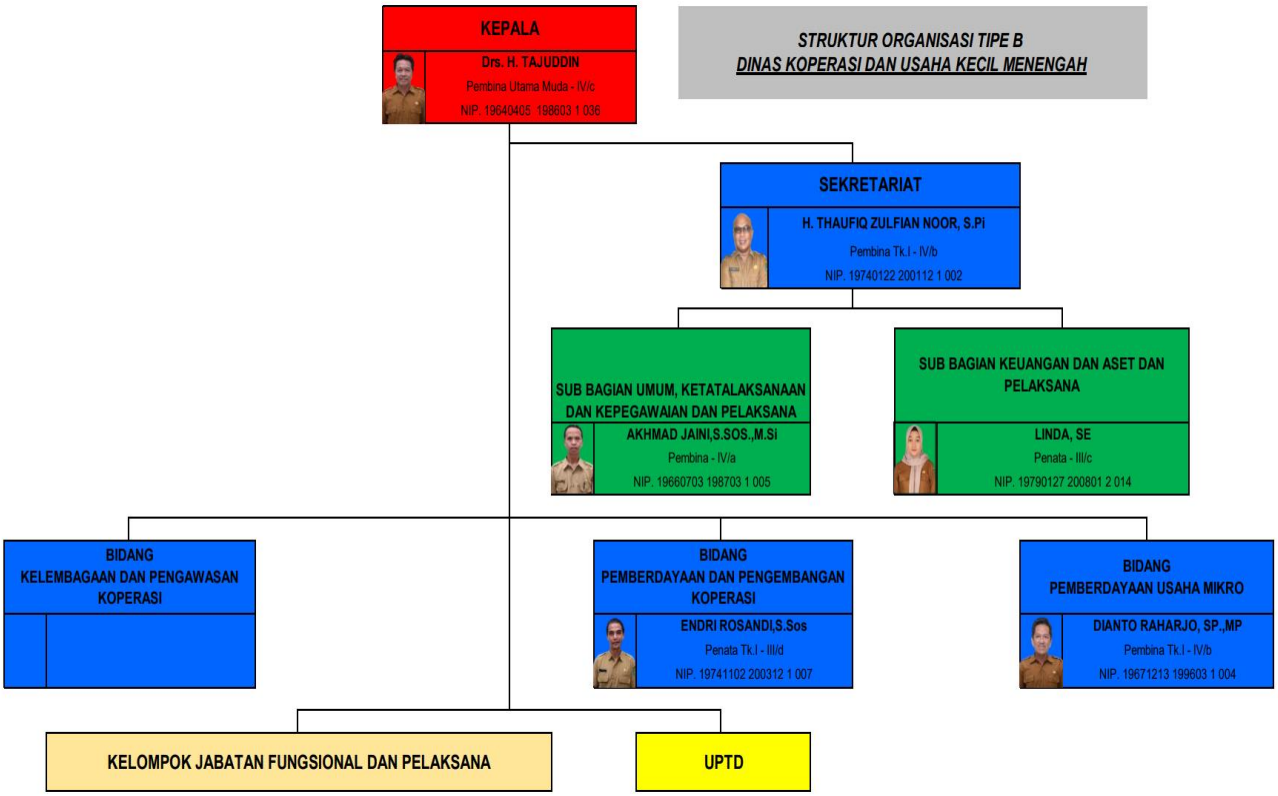

Kekuatan sumber daya manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah berjumlah 90 orang untuk ASN 68 orang dengan perincian Pejabat Struktural 6 orang Pejabat Fungsional 7 Orang, Pelaksana 55 orang, dan Non ASN/THL 22 orang yang terdiri dari :

Laki –laki : 42 orang
Perempuan : 48 orang
Total Asn/Non Asn : 90 orang

Jumlah Pejabat Struktural

- Esselon II/b : 1 Orang
- Esselon III/a : 1 Orang
- Esselon III/a : 2 Orang
- Esselon IV/a : 2 Orang

6 Orang

Jumlah Pejabat Fungsional

- Pengawas Koperasi Ahli Muda : 7 Orang

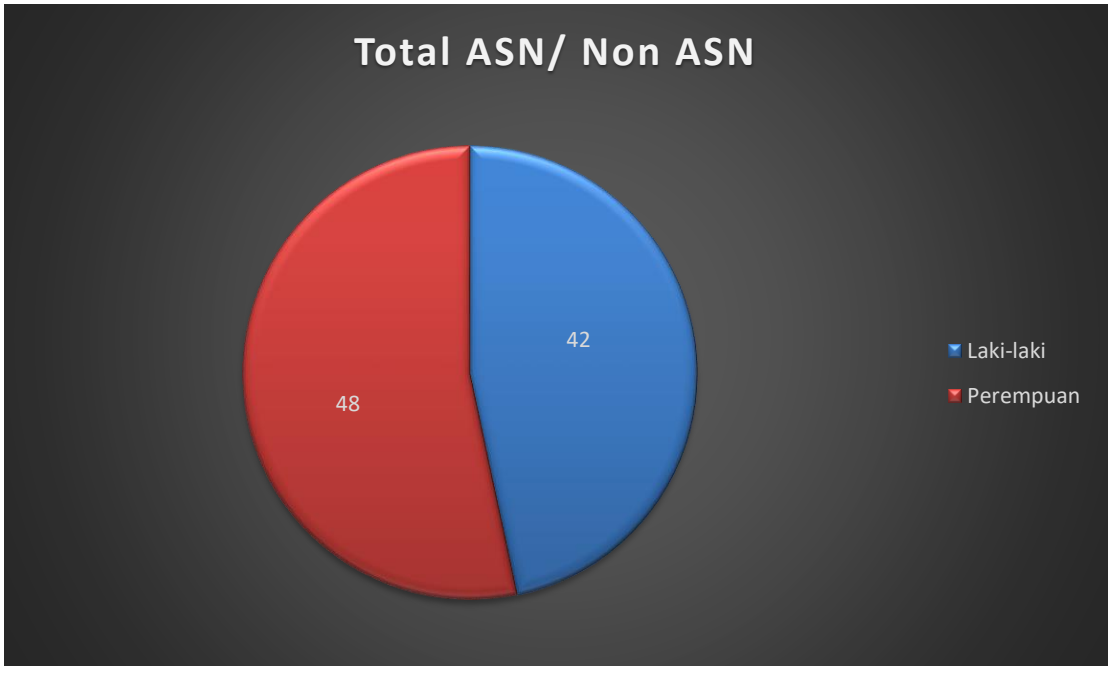

Tabel 1.1

Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Status Kepegawaian	BIDANG					
		Sekretariat	Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi	Pemberdayaan Usaha Mikro	JF	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	ASN	20	12	11	18	7	68
	THL	8	11	1	2	0	22
Jumlah Perbidang ASN		28	24	12	18	7	91

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	**Jenjang Pendidikan**	**Pegawai Negeri Sipil (PNS)**																**JUMLAH PNS**
		Golongan IV				**Golongan III**				**Golongan II**				**Golongan I**				
		a	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	**a**	**b**	**c**	**d**	
1	S-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0**
2	S-2	4	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	**8**
3	S-1	-	1	1	-	2	1	4	15	-	-	-	-	-	-	-	-	**24**
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
5	SD/SLTP/SLTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	31	-	-	-	-	**35**
Jumlah		**4**	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**5**	**18**	**0**	**1**	**3**	**31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68**

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Data	Pegawai Negeri Sipil (PNS)																JUMLAH PNS
		Golongan IV				Golongan III				Golongan II				Golongan I				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	PNS	4	2	1	0	2	1	5	18	0	1	3	31	0	0	0	0	68
		7				26				35				0				68 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

Tabel 1.4
Data Pejabat Struktural yang Memenuhi
Persyaratan Diklat PIM

NO	KUALIFIKASI DIKLAT PIM	ESSELON				JUMLAH
		II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Sudah Diklat PIM	1	1	2	1	5
2	Lulus Tes	-	-	-	-	0
3	Belum Tes	-	-	-	1	1
	JUMLAH	1	1	2	2	6 Orang

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 - 2026 untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi Dan UKM Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	DATA AWAL 2021	TARGET 2023	TARGET 2026	TARGET AKHIR RESNTRA 2026
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	82	82	82	82
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	0.23	0.44	1,01	3,20
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja DISKOP UKM	%	67.76	70	1,01	3,20

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kab. Kutai Kartanegara

No.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Persen	82,00
2	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	0,44
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Diskop UKM	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70,00
4	Menyelesaikan Tindak Lanjut Lapotran Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang di tindak lanjuti	Persen	100
5	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
6	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menjadi Kewenangan secara Efektif, Terbuka dan Bersaing, Transfaran, Adil tidak Diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persen	100
7	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
8	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)

9	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
10	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
11	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
12	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
13	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
14	Melaksanakan review awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Review Indikator Kenerja Utama	Dokumen	1
15	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya Kerja	Kegiatan	4
16	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
17	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	560.000.000,00	APBD
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	210.000.000,00	APBD
3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.575.000.000,00	APBD
4	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	200.000.000,00	APBD
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DARAH	12.320.503.400,00	APBD
6	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	450.000.000,00	APBD
7	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100.000.000,00	APBD
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.330.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		18.745.503.400,00	

Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2023 telah membuat Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2021-2026 sebagaimana **terdapat pada *lampiran 1.***

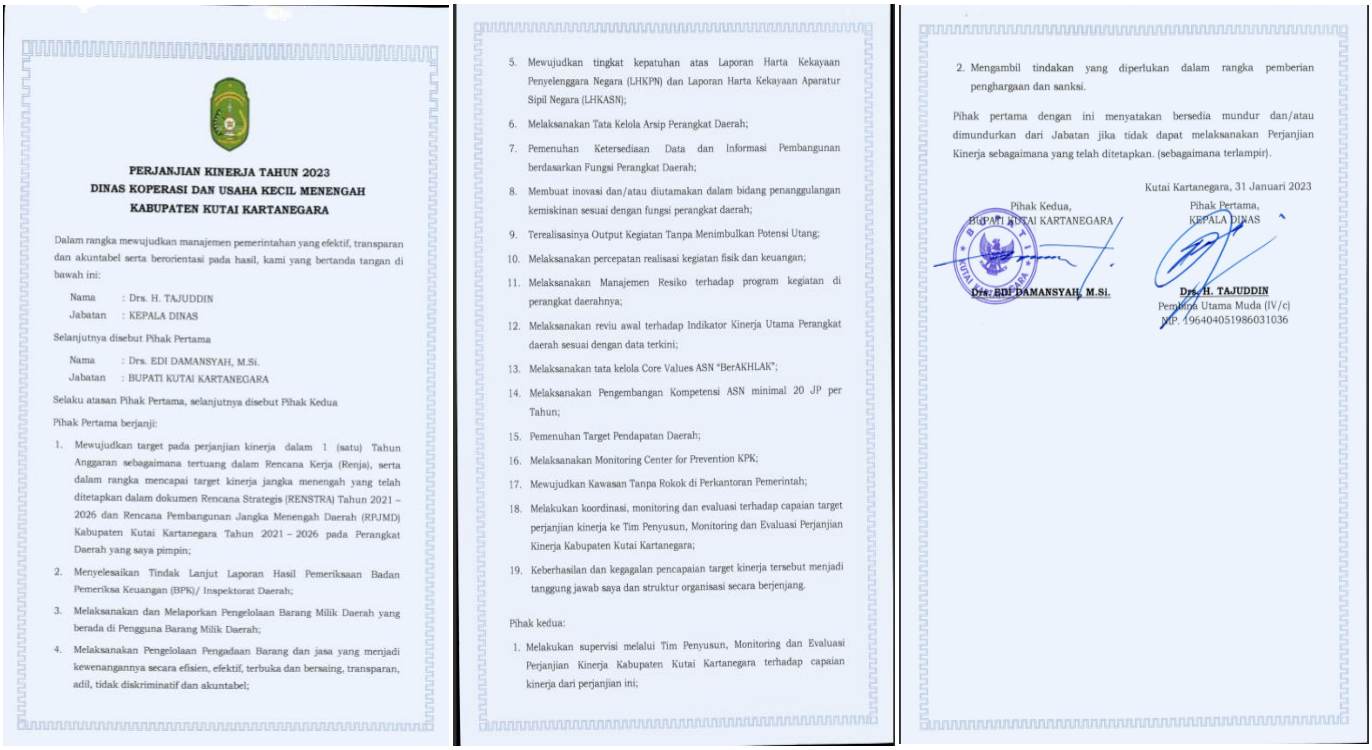

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. TAJUDDIN
Jabatan : KEPALA DINAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.
Jabatan : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah;
4. Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan;
11. Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya;
12. Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini;
13. Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK";
14. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun;
15. Pemenuhan Target Pendapatan Daerah;
16. Melaksanakan Monitoring Center for Prevention KPK;
17. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah;
18. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 31 Januari 2023

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS

Drs. H. TAJUDDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196404051986031036

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 sebesar 100 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja SANGAT TINGGI. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria Penilaian
1.	Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	82,59	83,16	100,70	**Sangat Tinggi**
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase pertumbuhan wirausaha baru	%	0,44	0,68	154,55	**Sangat Tinggi**
Rata - Rata						**100**	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi Aktif

Target kinerja "Persentase Koperasi Aktif" tahun 2023 sebesar 82.59 % dan realisasinya 83.16 % atau capaian kinerja sebesar 100.70% dengan predikat "Sangat Tinggi"

Dan bila memperhatikan Tabel diatas, pada tahun 2023 capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif yaitu 100.70 % dimana realisasinya lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase Koperasi Aktif adalah Sangat tinggi, dari capaian angka-angka tersebut dapat kita lihat penjelasan pada table berikut :

Tabel 3.1.2

Persentasi Koperasi Aktif Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran Konsistensi

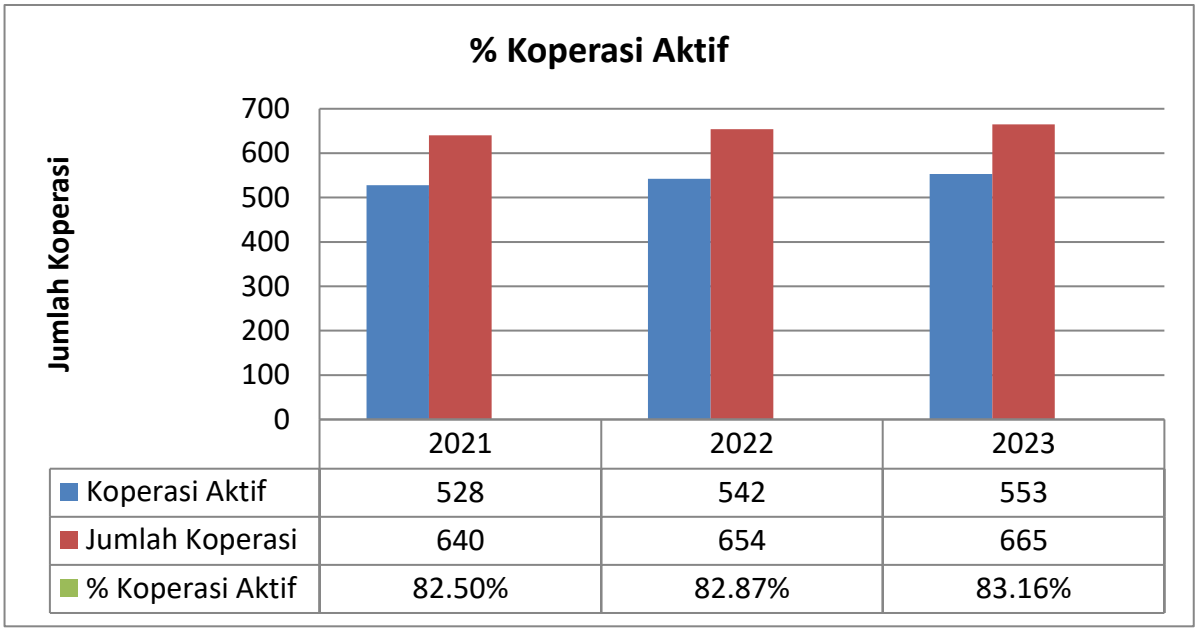

	2021	2022	2023
Koperasi Aktif	528	542	553
Jumlah Koperasi	640	654	665
% Koperasi Aktif	82.50%	82.87%	83.16%

Persentase Koperasi Aktif diukur dengan dua indikator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan dengan angka 553 Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2022 dengan angka 542 Koperasi Aktif, dan ditahun 2021 dengan angka 525 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun 2023 dimana jumlah Koperasi sebanyak 665, untuk persentase koperasi aktif tahun 2023 sebesar 83.16% mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 82,87%.

Tabel 3.1.3

Sebaran Koperasi Aktif Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KOPERASI	AKTIF	TDK AKTIF	BEKU	RAT
1	TABANG	24	23	1	-	5
2	KEMBANG JANGGUT	35	35	0	-	17
3	KENOHAN	17	17	0	-	6
4	MUARA WIS	9	7	2	-	2
5	KOTA BANGUN	15	14	1	-	5
6	KOTA BANGUN DARAT	9	9	0		3
7	MUARA KAMAN	50	46	4	-	18
8	MUARA MUNTAI	20	18	2	-	4
9	SEBULU	41	34	7	-	2
10	TENGGARONG	127	105	22	-	13
11	TENGGARONG SEBERANG	36	30	6	-	4
12	LOA KULU	53	48	5	-	6
13	LOA JANAN	36	27	9	-	3
14	SANGA SANGA	31	16	15	-	1
15	MUARA JAWA	30	24	6	-	3
16	SAMBOJA	38	27	11	-	3
17	SAMBOJA BARAT	16	16	0		3
18	ANGGANA	22	18	4	-	3
19	MUARA BADAK	33	25	8	-	3
20	MARANGKAYU	23	14	9	-	3
JUMLAH		**665**	**553**	**112**	**-**	**106**

2) Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan Indikator Presentase Pertumbuhan Wirausaha Baru angka capaian sebesar 0.68 % dari target 0,44% atau tingkat capaian sebesar ≥ 100 % 'Sangat Tinggi'. Dapat di jelaskan pula dari tabel di bawah, pada tahun 2023 Persentase pertumbuhan wirausaha baru yaitu 0,68% dimana realisasinya tecapai sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 0,44% atau capaian ≥100 % sehingga kriteria penilaian untuk Indikator Persentase pertumbuhan wirausaha baru adalah Sangat Tinggi.

Tabel 3.1.4

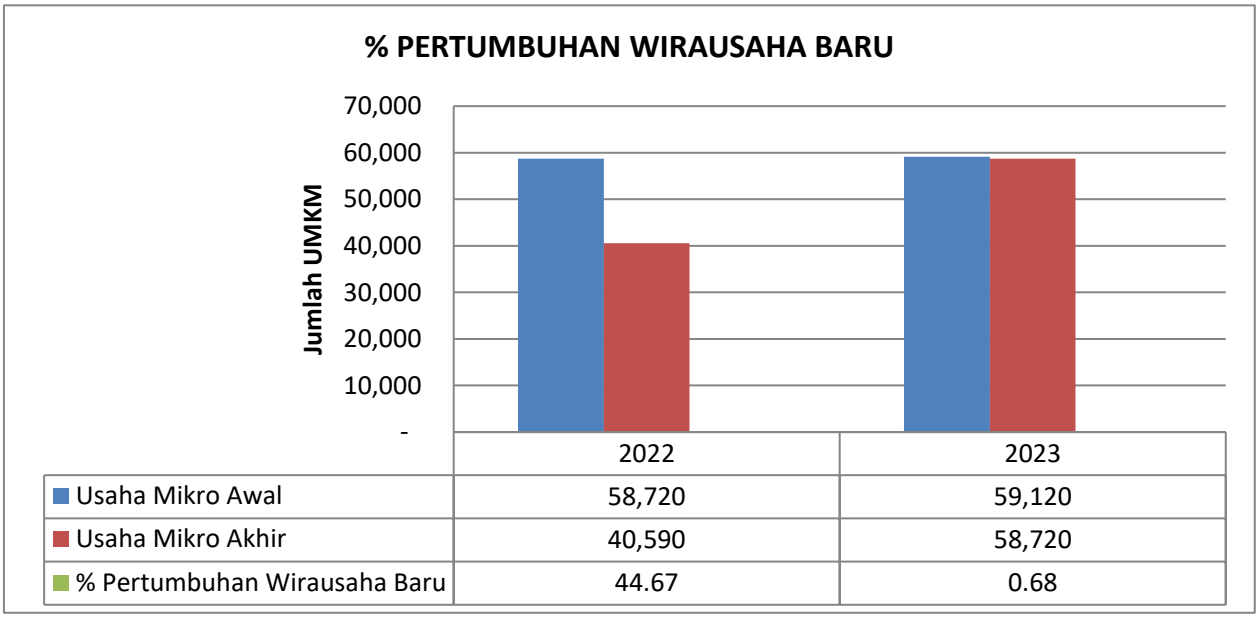

	2022	2023
Usaha Mikro Awal	58,720	59,120
Usaha Mikro Akhir	40,590	58,720
% Pertumbuhan Wirausaha Baru	44.67	0.68

Pada table diatas kita ketahui bahwa Tolak ukur sasaran ***Meningkatnya Produktifitas Melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM*** diukur dengan dua indikator yaitu Jumlah usaha mikro awal dikurang jumlah usaha mikro akhir dibandingkan dengan Jumlah usaha mikro awal.

Capaian kedua indikator sasaran sudah sesuai bahkan melebih target yang ditetapkan dan berada di kriteria sangat tinggi. Dengan demikian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 berada di kriteria capaian kinerja sangat tinggi.

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Capaian indikator ini jika dibandingkan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 akan memperlihatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Capaian Kinerja	
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	82,53%	82,87%	100,41	82,59%	83,16%	100,70%	
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0,35 %	44,67%	12.762,86	0,44 %	0,65%	154,55%	

Indikator Kinerja Utama Persentase koperasi Aktif Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 83,16% . Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 82,87 % Terjadi peningkatan kinerja sebesar 0,29%. Indikator kinerja utama yang kedua pada sasaran strategis meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru adalah Persentase pertumbuhan wirausaha baru dengan target tahun 2023 sebesar 0,44%, realisasi sebesar 0,65% sehingga capaian kinerjanya 154,55% dan ini mengalami penurunan kinerja dari tahun 2022 sebesar 12.762,86% dan ini menunjukan adanya penurunan bila dilihat dari angka realisasi tahun lalu. Ini dkarenakan adanya Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada 16 Februari 2021 lalu. PP UMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra/ RPJMD	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
Persentase Koperasi Aktif	82,70%	83,16%	100,56%
Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	3,20%	0,65%	20,31%

Tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator persentase koperasi aktif jika dibandingkan dengan target kinerja pada akhir periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2021-2026 sangat tinggi yaitu sebesar 100,56% tingkat kemajuan pencapaian target. Sedangkan capaian kinerja indicator persentase pertumbuhan wirausaha baru yaitu sebesar 20,31% tingkat kemajuan. Tahun 2026 merupakan tahun akhir Renstra Dinas Koperasi dan UKM. Capaian indikator ini akan menjadi evaluasi kedepan dalam penetapan target pada Renstra berikutnya.

3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ini dengan standar nasional adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023			Standar Nasional		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Presentase Koperasi Aktif	Persentase	82,59%	83,16%	100,70%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase	0,44 %	0,65%	154,55%	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Dari 3.4 dapat dilihat bahwa Dua indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara tidak ada Kenaikan/ Penurunan capaian kinerja apabila dibandingkan dengan standar nasional.

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan ataupun Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

a. Persentase Koperasi Aktif

Faktor Pendorong/ Keberhasilan :

Faktor pendorong atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Adanya Kegiatan pendampingan dan Memonitoring Rapat Anggota Koperasi ketaatan Koperasi dalam melaksanakan kewajibannya salah satunya Rapat Anggota tahunan, sebagaimana Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 26 ayat 1 bahwa rapat anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam setahun.

DOKUMENTASI RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT)
TAHUN 2022

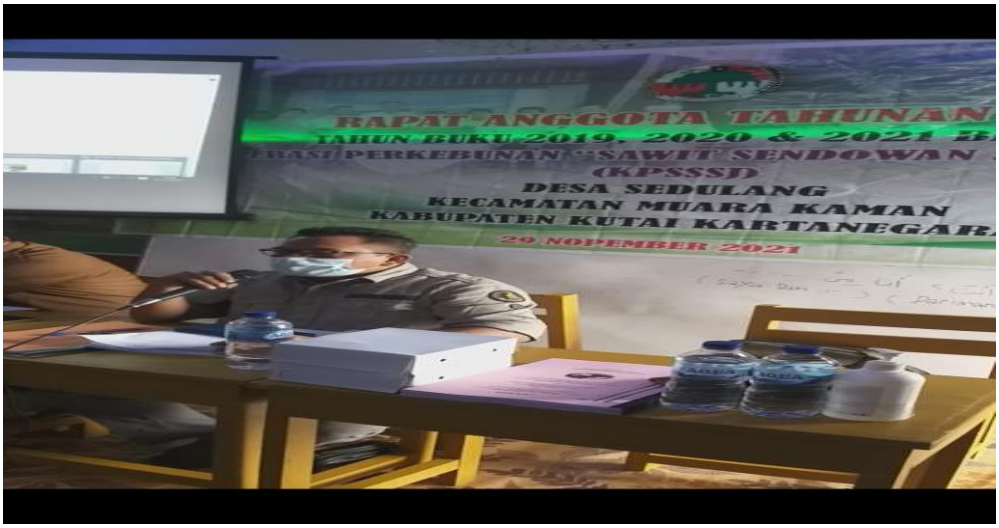

2. Adanya Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota, yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Kab. Kutai Kartanegara

3. Melaksanakan Pelatihan bagi Pengurus/Pengawas/Pengelola dan anggota Koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM koperasi, sesuai dengan prinsip - prinsip koperasi.

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan bagi Pengurus/pengelola Koperasi di Kab. Kutai Kartanegara

4. Adanya kegiatan-kegiatan Pendampingan kepada Pengurus Koperasi baik di Sektor Pertanian dan Koperasi di Sektor usaha lainnya dan memberikan bimbingan teknis tentang Perkoperasian Monitoring, Pendampingan Penyusunann Laporan, Sinkronisasi, Peralihan Penggunaan Dana Bergulir LPD;

Dokumentasi

Dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Dan Pembuatan Laporan Koperasi Pengelola

5. Adanya kegiatan dukungan Sertifikasi Pegelola Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dokumentasi

Pelaksanaan Diklat dan Uji Kompetensi Pengelola Simpan Pinjam Koperasi TA. 2023

6. Bimbingan Digitalisasi Koperasi, Sosialisasi Perkoperasian, FGD, Penggunaan Produk dalam Negeri (e-catalog);

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Digitalisasi Perkoperasian, Bimbingan Teknis Manajemen Keuangan Di Ruang Praktek Bersama Digitalisasi Kumkm

Dokumentasi Sosialisasi Perkoperasian, FGD, Penggunaan Produk dalam Negeri (e-catalog)

7. Pelatihan Dasar CPPOB bagi Pengelola RPB dRPB Desa Jonggon Jaya.

Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Terjadinya in-konsistensi penyelenggaraan rapat anggota tahunan secara rutin setiap tahunnya;
2. Kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus seperti laporan keuangan koperasi yang harus dipertanggung jawabkan dalam Rapat Aggota Tahunan (RAT);
3. Minimnya kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian atau Bimbingan Teknis Perkoperasian.

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemahaman kepada pengelola koperasi tentang kewajiban melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal sekali dalam setahun;
2. Percepatan pendampingan penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi sebagai bahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota melalui rapat anggota tahunan;
3. Meningkatkan anggaran pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis perkoperasian;

b. Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru

Faktor Pendorong :

Faktor pendukung atau penyebab keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Pembinaan langsung kelapangan berhadapan dengan pelaku usaha mikro;

2. Pelaku Usaha Mikro antusias dengan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM;

3. Pelaku usaha mikro yang pro aktif atas kesadaran untuk memiliki legalitas usaha;
4. Dukungan dari perangkat daerah dan instansi terkait diwilayah UMKM berada.

Faktor Penghambat/ Kegagalan :

1. Jadwal yang telah ditetapkan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan yang lain;
2. Kurangnya SDM yang Kompeten;
3. Sarana Prasarana dan jaringan internet kurang mendukung;
4. NIK UMKM sudah terdaftar dikegiatan lain sehingga tidak bisa diproses lebih lanjut untuk pembuatan legalitas.

Tindak Lanjut / Solusi :

1. Menyesuaikan anggaran;
2. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan;
3. Dukungan sarpras dan Jaringan Internet mandiri;
4. Pembuatan NIB dibantu tim dari DPMPTSP;
5. Dukungan NPWP oleh KPP Pajak Pratama;
6. Kerjasama dgn Dinas Kesehatan untuk PKP dan PIRT;
7. Adanya Halal Sehati dan dukungan LP POM MUI ;
8. Pecepatan pengadaan sarpras oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar;
9. Pelaku harus mandiri untuk mencari identitas awal pembuatan NIK.

3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja ini Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan efesiensi penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Salah satu efesiensi adalah pemanfaatan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6.1

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)	(7)
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**0**	**0**	**0**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	**600.000.000,-**	**475.245.927,-**	**124.754.073,-**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	**645.000.000,-**	**419.314.060,-**	**225.685.940,-**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 %	**200.000.000,-**	**198.308.000,-**	**1.692.000,-**	**Terjadi Efisiensi**
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	**1.250.000.000,-**	**795.401.506,-**	**454.598.494,-**	**Terjadi Efisiensi**
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.055.000.000,-**	**2.099.483.857,-**	**955.516.143,-**	**Terjadi Efisiensi**

		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	**8.201.162.000,-**	**7.216.071.732,-**	**985.090.268,-**	**Terjadi Efisiensi**
		JUMLAH	**13.951.162.000,-**	**11.203.825.082,-**	**2.747.336.918,-**	**Terjadi Efisiensi**

Dari tabel 3.6.1 dapat dilihat bahwa efesiensi telah dilakukan dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator persentase Koperasi Aktif dan Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru adalah sebesar Rp. 2.747.336.918,- atau sebesar 19,69%.

3.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Untuk sasaran yang pertama yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :
    1. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/ USP KOPERASI

       Indikator kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tahun 2023 yaitu Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat dengan target sebesar 7,41% dan realisasinya 7,41% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai;
    2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

       Indikator Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi tahun 2023 adalah Persentase meningkatnya omzet dan asset koperasi dengan target 1,95%
2. Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru capaian kinerja ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bawah ini :
    1. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

       Sub Kegiatan Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro.

       Indikator kinerja Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) tahun 2023 yaitu persentase UMKM yang telah difasilitasi dengan target 1,99% dan realisasinya 1,99% atau capaian kinerjanya sebesar 100%. Target kinerja tercapai.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Sub Kegiatan Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi.

Indikator kinerja Program Pengembangan UMKM tahun 2023 yaitu pertumbuhan omzet UMKM dengan target 0,6% dan realisasinya 0,6% atau capaian kinerjanya sebesar 100 %. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.7.1

Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Konsistensi Persentase Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	7,41 %	7,41%	100%	Berhasil
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	1,95%	1,95%	100%	Berhasil
Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	1,99%	1,99%	100%	Berhasil
		Pengembangan UMKM	0,6%	0,6%	100%	Berhasil

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2023. Dalam mencapai indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi, UKM didukung oleh anggaran dari APBD.

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Tahun 2023

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			
		Pagu Anggaran (%)	Realisasi (%)	%	Sisa Anggaran
2.17.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**18.022.919.148**	**16.166.577.215**	**89.70**	**1.856.341.933**
2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**290.000.000**	**229.078.094**	**78**	**60.921.906**
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**100.000.000**	**82.273.000**	**82.27**	**17.727.000**
2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**190.000.000**	**146.805.094**	**77.27**	**43.194.906**
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**8.867.651.075**	**7.965.194.669**	**89.82**	**902.456.406**
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**8.763.210.075**	**7.863.494.669**	**89.73**	**899.715.406**
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**104.441.000**	**101.700.000**	**97.38**	**2.741.000**
2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**93.926.000**	**80.810.000**	**86.04**	**13.116.000**
2.17.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**93.926.000**	**80.810.000**	**86.04**	**13.116.000**
2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**333.110.000**	**291.850.000**	**87.61**	**41.260.000**

2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**283.110.000**	**225.360.000**	**90.20**	**27.750.000**
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**50.000.0000**	**36.490.000**	**72.98**	**13.150.000**
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.425.071.335**	**1.256.929.246**	**88.20**	**168.142.089**
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**120.000.000**	**114.856.000**	**95.71**	**5.144.000**
2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**70.000.000**	**66.852.000**	**95.50**	**3.148.000**
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**10.000.000**	**6.690.000**	**66.90**	**3.310.000**
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**49.999.800**	**38.099.600**	**76.20**	**11.900.200**
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**330.071.535**	**315.173.896**	**95.49**	**14.897.639**
2.17.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	**195.000.000**	**87.209.000**	**44.97**	**107.791.000**
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**325.000.000**	**314.833.000**	**96.87**	**10.166.250**
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	**325.000.000**	**313.215.000**	**96.37**	**11.785.000**
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**2.717.465.032**	**2.538.902.572**	**93.43**	**178.562.480**
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**2.717.465.032**	**2.538.902.572**	**93.43**	**178.562.480**
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.115.873.740**	**727.542.142**	**65.20**	**388.331.598**
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**2.398.000**	**1.860.000**	**77.56**	**538.000**
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**354.036.580**	**203.451.180**	**57.47**	**150.585.400**
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**759.439.160**	**522.230.962**	**68.77**	**237.208.198**
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.179.821.966**	**3.076.270.492**	**96.74**	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	**546.220.000**	**501.533.211**	**91.82**	**44.686.789**

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	**75.000.000**	**70.695.000**	**94.26**	**4.305.000**
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**2.558.601.966**	**2.504.042.281**	**97.87**	**54.559.685**
2.17.02	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.17.02.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	**0**	**0**	**0**	**0**
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**600.000.000**	**475.245.927**	**79.21**	**124.754.073**
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**600.000.000**	**475.245.927**	**79.21**	**124.754.073**
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**175.000.000**	**169.608.604**	**96.92**	**169.608.604**
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	**425.000.000**	**305.637.323**	**71.91**	**119.362.677**
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**645.000.000**	**419.314.060**	**65.01**	**225.685.940**
2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu)**	**645.000.000**	**419.314.060**	**65.01**	**225.685.940**

	Daerah Kabupaten/Kota				
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	295.000.000	191.639.560	64.96	**103.363.440**
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	350.000.000	227.677.500	65.05	122.322.500
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**200.000.000**	**198.308.000**	**99.15**	**1.692.000**
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**200.000.000**	**198.308.000**	**99.15**	**1.692.000**
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	**200.000.000**	**198.308.000**	**99.15**	**1.692.000**
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**1.250.000.000**	**795.401.506**	**63.63**	**454.598.494**
2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.250.000.000**	**795.401.506**	**63.63**	**454.598.494**
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**1.250.000.000**	**795.401.506**	**63.63**	**454.598.494**
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.055.000.000**	**2.099.483.857**	**68.72**	**955.516.143**
2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.055.000.000**	**2.099.483.857**	**68.72**	**955.516.143**

2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**200.000.000**	**104.733.000**	**52.37**	**95.267.000**
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	**50.000.000**	**43.267.000**	**86.53**	**6.733.000**
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	**1.000.000.000**	**711.118.662**	**71.11**	**288.881.338**
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	**1.105.000.000**	**823.874.575**	**74.56**	**281.125.425**
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	**700.000.000**	**416.490.620**	**59.50**	**283.509.380**
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**				
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**8.201.162.000**	**7.216.071.732**	**87.99**	**985.090.268**
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	**8.201.162.000**	**7.216.071.732**	**87.99**	**985.090.268**
	JUMLAH	**31.974.081.148**	**27.370.402.297**	**85.60**	**4.603.678.851**

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023 Capaian Kinerja sebesar 77,70 % dan Capaian anggaran sebesar 85,60% (Sangat Tinggi / Tinggi / Sedang / Rendah / Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut :

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota sebesar 84,05% (Tinggi) dan capaian anggaran 89,70% (Tinggi);
2) Capaian kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar 84,4% (Tinggi) dan capaian anggaran 89,70 % (Tinggi);
3) Capaian kinerja Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi sebesar 65,05% (Sedang) dan capaian anggaran 65,01% (Sedang);
4) Capaian kinerja Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar 100% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran sebesar 99,15% (Tinggi);
5) Capaian kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar 95% (Tinggi) dan capaian anggaran 68,72% (Sedang);
6) Capaian kinerja Program Pengembangan UMKM sebesar 100% (Sangat tinggi) dan capaian anggaran 87,99 (Tinggi)%;
7) Capaian kinerja Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar 80,33 % (Tinggi) dan capaian anggaran 63,63% (Sedang);

Pada tahun 2023 Sasaran Konsistensi Persentase Koperasi Aktif diukur dengan dua indicator yaitu Indikator Koperasi Aktif yang dibandingkan dengan Jumlah Koperasi seluruhnya. Dimana Koperasi Aktif pada tahun 2023 ini mengalami kenaikan dengan angka 553 Koperasi Aktif jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 2022 dengan angka 542 Koperasi Aktif, dan ditahun 2021 dengan angka 528 Koperasi Aktif maka Koperasi Aktif mengalami peningkatan, sedangkan Jumlah Koperasi seluruhnya mengalami trend peningkatan pula di tahun 2023 dimana jumlah Koperasi sebanyak 665, untuk persentase koperasi aktif tahun 2023 sebesar 83,16% mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 82,87%.

Pada tahun 2023 Hasil evaluasi capaian kinerja Meningkatnya Pertumbuhan Wirausaha Baru dengan Indikator Presentase Pertumbuhan Wirausaha Baru angka realisasi sebesar 0,65% dari target 0,44% atau tingkat capaian sebesar 154,55% ‘Sangat

Tinggi'.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam rangka pemahaman kepada pengelola koperasi tentang kewajiban melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal sekali dalam setahun;
2. Percepatan pendampingan penyusunan Laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi sebagai bahan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas kepada anggota melalui rapat anggota tahunan;
3. Meningkatkan anggaran pendidikan dan latihan atau bimbingan teknis Menyesuaikan anggaran;
4. Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan;
5. Dukungan sarpras dan Jaringan Internet mandiri;
6. Pembuatan NIB dibantu tim dari DPMPTSP;
7. Dukungan NPWP oleh KPP Pajak Pratama;
8. Kerjasama dgn Dinas Kesehatan untuk PKP dan PIRT;
9. Adanya Halal Sehati dan dukungan LP POM MUI ;
10. Pecepatan pengadaan sarpras oleh Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kukar;
11. Pelaku harus mandiri untuk mencari identitas awal pembuatan NIK perkoperasian;

Guna pencapaian target yang lebih luas dan lebih banyak, agar diberikan penambahan anggaran kegiatan sub kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 28 Februari 2024

KEPALA DINAS KOPERASI

DAN USAHA KECIL MENENGAH

Drs. H. Tajuddin

Pembina Utama Muda

NIP. 19640405 198603 1 036